

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kegiatan bisnis yang berkembang pesat saat ini secara tidak langsung menuntut tersedianya penyajian laporan keuangan yang akurat dan relevan serta dapat dipercaya sebagai acuan dasar dalam pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan. Dalam kondisi ini, peran auditor menjadi salah satu peran yang penting karena tugas auditor adalah memberikan penilaian serta kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh entitas. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai auditor perlu pemahaman yang baik terhadap standar akuntansi yang berlaku. Stiawan (2026) menyimpulkan setiap perubahan standar akuntansi yang berlaku secara langsung akan mempengaruhi prosedur dan pelaksanaan audit, termasuk dalam memberikan kualitas opini yang dihasilkan.

Saat ini di Indonesia salah satu perubahan standar akuntansi yang cukup signifikan ialah penggantian Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) diganti dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Penerapan SAK EP ini disusun sebagai pembaruan dan pengganti SAK ETAP untuk memberikan standar akuntansi yang lebih relevan, mutakhir, dan sesuai dengan perkembangan global khususnya bagi entitas privat yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Perubahan ini tidak hanya berdampak bagi entitas melainkan juga auditor yang menerima dampak perubahan tersebut karena perlu adanya pemahaman terhadap perubahan implikasi dan standar pelaporan keuangan untuk menentukan prosedur audit yang tepat.

Dilansir dari data SIDT-UMKM yang bersumber dari Kementerian UMKM RI, 2025 yang dijelaskan oleh Anastasya.A, Mei 7 (2026) menyatakan data jumlah UMKM di Indonesia per 31 Desember 2025 yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Unit UMKM di Indonesia

UMKM	Unit Usaha	Persentase
Usaha Mikro	30.119.928	99,70%
Usaha Kecil	73.828	0.24%
Usaha Menengah	15.313	0,05%
TOTAL	30.209.069	100%

Sumber: SIDT-UMKM

Dari data jumlah UMKM di Indonesia per 2025 terutama pada tingkat usaha menengah menunjukkan besarnya populasi entitas privat yang dapat menggunakan SAK EP sebagai dasar acuan untuk menyusun laporan keuangan, terlebih tidak hanya pada sektor UMKM melainkan kategori lain seperti koperasi dan entitas privat swasta yang tidak memiliki akuntabilitas publik sehingga secara tidak langsung banyak entitas yang mengalami dampak dari transisi perubahan SAK ETAP ke SAK EP. Dengan data tersebut, auditor dituntut untuk bisa memiliki dan memahami perubahan standar yang baru dan memadai terkhusus juga di KAP Djoko, Sidik, Indra dan Rekan. Ketidaksiapan dari para auditor dalam memahami transisi baru dari SAK EP akan sangat memberikan dampak bagi para entitas yang menggunakan SAK EP sebagai acuan serta berpengaruh pada kualitas audit laporan keuangan pada skala yang luas..

SAK ETAP berlaku sejak 2011 yang mengadaptasi IFRS for SMEs versi 2009 dan tidak pernah diperbarui secara signifikan untuk mengikuti perkembangan global sejak itu. Namun perkembangan global yang semakin meningkat tentunya membuat standar tersebut menjadi semakin tidak relevan. SAK ETAP mulai dinilai kurang memadai oleh para pengguna laporan keuangan karena kurang mencerminkan posisi keuangan dan kinerja entitas privat secara akurat. Menurut Purba, dkk (2025) yang menjelaskan adanya keterbatasan standar akuntansi dapat berdampak bagi kualitas laporan keuangan, terutama pada aspek transparansi informasi. Dari sisi auditor

kondisi tersebut menjadi tantangan karena diharuskan mampu menyesuaikan prosedur dan pelaksanaan audit dengan standar akuntansi yang baru.

Penerapan SAK EP membuat berbagai perubahan khususnya pada aspek pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Beberapa hal yang kini diatur dalam SAK EP seperti total penghasilan komprehensif, aset atau liabilitas pajak tangguhan, pelepasan kelompok aset dan liabilitas, pengakuan, pengukuran dan pengakuan imbalan kerja yang sebelumnya tidak diatur secara rinci pada SAK ETAP. Selain itu juga diwajibkan penyajian kembali (*restatement*) bagi entitas yang sebelumnya menyajikan laporan keuangan menggunakan SAK ETAP agar dapat dipertimbangkan. Penelitian yang dilakukan Madaharsa & Muslimin (2025) menjelaskan transisi standar dari SAK ETAP ke SAK EP memberikan perubahan yang signifikan pada pelaporan keuangan dan menimbulkan tantangan dalam penerapannya.

Bagi auditor perubahan ini memunculkan kendala dan tantangan dalam melakukan prosedur audit dikarenakan banyak entitas yang belum sepenuhnya memahami penerapan SAK EP. Dalam jurnal Stiawan (2026) auditor mengalami kendala karena banyak entitas yang belum sepenuhnya memahami perhitungan dan penerapan standar baru sehingga berdampak bagi auditor dalam memberikan opini audit yang sesuai. Bisa dikatakan bahwa kurangnya pemahaman entitas berdampak juga bagi auditor dari segi pengujian dan analisis prosedur audit. Selain itu jika auditor juga tidak memahami sepenuhnya mengenai SAK EP akan memberikan dampak dalam menurunnya kualitas audit, seperti yang dijelaskan dalam jurnal penelitian yang dilakukan Rosnidah, et al (2025) yang menjelaskan tingkat pemahaman terhadap standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Dampak lainnya juga akan mengurangi tingkat kepercayaan kepentingan pengguna dikarenakan kualitas audit yang belum sepenuhnya diterapkan.

Penelitian dan jurnal mengenai perubahan penerapan SAK ETAP ke SAK EP semakin berkembang dan banyak dibahas, namun sebagian besar masih berfokus pada kesiapan entitas dalam penerapan SAK EP mengenai

penyusunan laporan keuangan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Madaharsa dan Muslimin (2025) yang meneliti implementasi SAK EP pada perusahaan manufaktur dan jasa. Jurnal yang membahas secara khusus dari sisi auditor sebagai subjek utama nya masih sangat terbatas. Ada beberapa penelitian yang membahas pemahaman auditor mengenai penerapan SAK EP seperti yang dilakukan Zakkiandri (2025) yang meneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner tertutup sehingga belum menggali secara mendalam bagaimana auditor memahami, menginterpretasi dan menerapkan perubahan SAK EP dalam konteks pekerjaan auditor yang sesungguhnya.

Dari celah penelitian terdahulu, pengamatan ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat SAK EP telah resmi diberlakukan per 1 Januari 2025 dan auditor di KAP sekarang bukan lagi berada di ranah tahap persiapan dan antisipatif melainkan berada di tengah-tengah penerapannya. Sehingga, pemahaman auditor sudah menjadi dasar kebutuhan dalam penerapan prosedur audit yang tentu sangat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Jika auditor belum memahami perubahan yang dibawa SAK EP maka risiko salah saji material dan pemberian opini audit atas laporan keuangan entitas privat menjadi semakin besar.

KAP Djoko, Sidik, Indra dan Rekan (DSI) sebagai penyedia jasa audit dipilih sebagai objek kajian ilmiah penulis dikarenakan penulis telah melakukan praktek kerja lapangan di KAP DSI selama 6 bulan sehingga penulis merasa layak menjadikan KAP DSI menjadi objek kajian ilmiah. Selain itu KAP DSI sudah banyak menangani klien-klien yang berentitas privat dimana sebagian besar pelaporan keuangan sebelumnya masih menerapkan SAK ETAP. Dengan demikian, berlakunya SAK EP sejak Januari 2025 menuntut KAP DSI untuk memahami dan melakukan prosedur audit sesuai SAK EP yang berlaku serta membantu klien dalam proses transisi laporan keuangan.

Menurut Stiawan (2026), tingkat pemahaman auditor menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Dari

uraian tersebut penulis menilai bahwa KAP Djoko, Sidik, Indra (DSI) yang secara aktif memberikan jasa audit bagi entitas privat dapat menjadi objek yang relevan untuk mendeskripsikan sejauh mana pemahaman auditor terhadap perubahan SAK ETAP ke SAK EP pada lingkungan kerja nyata. Auditor di KAP DSI menghadapi tantangan nyata pada perubahan prosedur, pengukuran, penilaian hingga evaluasi kesesuaian laporan keuangan entitas dalam pekerjaan sehari-hari auditor. Karena itu, pengamatan ini memberikan gambaran aktual secara dalam mengenai sejauh mana auditor di KAP Djoko, Sidik, Indra dan Rekan paham terhadap perubahan penerapan SAK ETAP ke SAK EP, dan hasilnya dapat menjadi masukan bagi KAP dan auditor dalam menjalani prosedur audit yang lebih efektif dan tepat sasaran.

I.2 Tujuan

1. Mengetahui tingkat pemahaman auditor terhadap perubahan penerapan SAK ETAP ke SAK EP pada KAP Djoko, Sidik, Indra dan Rekan.
2. Mengidentifikasi perbedaan utama antara SAK ETAP dan SAK EP yang dipahami oleh auditor dalam pelaksanaan audit laporan keuangan.
3. Mengidentifikasi dampak dan kendala yang dihadapi auditor dalam penerapan SAK EP terhadap prosedur audit laporan keuangan.

I.3 Manfaat

1. Manfaat Teoritis dan Akademik

Kajian ilmiah ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas di bidang akuntansi mengenai perubahan standar dari SAK ETAP ke SAK EP dan dampaknya bagi peran auditor. Diharapkan hasil dari kajian ilmiah ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi penelitian atau kajian ilmiah selanjutnya yang membahas topik sejenis. Bagi penulis, kajian ilmiah ini menjadi kesempatan bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan selama masa praktek kerja lapangan penulis di Kantor Akuntan Publik, serta bagi institusi pendidikan kajian ilmiah ini dapat menambah koleksi referensi yang mendukung selama proses pembelajaran mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Auditor, diharapkan dapat membantu auditor dalam meningkatkan pemahaman terhadap perubahan standar akuntansi yang berlaku serta mampu menyesuaikan diri dan mendorong keinginan untuk lebih memahami perubahan SAK ETAP ke SAK EP sehingga dapat menjalankan prosedur audit sesuai standar yang berlaku.
- b. Bagi KAP, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menyusun program pelatihan atau sosialisasi internal audit mengenai SAK EP dalam audit laporan keuangan.
- c. Bagi mahasiswa, diharapkan bisa menambah pemahaman bagaimana standar akuntansi diterapkan dalam praktik kerja terkhusus pada bidang auditor dan memahami perubahan dari standar akuntansi yang diterapkan dapat memberikan banyak perubahan dalam proses dan pelaksanaan audit.